

## KEPUTUSAN BUPATI BANJAR NOMOR 376 TAHUN 2012

#### TENTANG

## PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR SMA MAWAR PUTIH ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

#### BUPATI BANJAR,

Menimbang

- : a. bahwa agar kegiatan Proses belajar mengajar SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
  - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem · (Lembaran Negara Republik Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Tahun 4. Undang-Undang Nomor 12 2011 Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang (Lembaran Negara Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah ;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan UJian Nasional Tahun Ajaran 2011/2012;

12.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Nomor 04/VI/PB/ 2011dan Menteri Agama Nomor :MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal/Bustanul Atfal dan Sekolah/ Madrasah;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);

15. Peraturan bupati banjar tion. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 57);

Memperhatikan : Pengajuan Proposal dari Yayasan Pendidikan Mawar Putih Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh, pada tanggal 10 Juli 2010 tentang Pendirian Sekolah Menengah " SMA MAWAR PUTIH "

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: Memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMA KESATU Aluh-Aluh MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan

Kabupaten Banjar.

: SMA MAWAR PUTIH Desa Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh KEDUA

Kabupaten Banjar sebagaimana maksud Diktum KESATU proses belajar dalam melaksanakan berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum

yang berlaku.

ditetapkannya Ijin KETIGA timbul akibat : Segala biaya yang

Operasional sebagaimana Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

sumber pembiayaan lain yang relevan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KEEMPAT

> Di tetapkan di Martapura Pada tanggal 14 Juni Jois

BUPATI BANJAR,

PANGERAN KHAIRUL SALEH

#### Tembusan:

1. Kementerian Pendidikan Nasional Cq. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta Cq.Direktur Pembinaan SMA

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

4. Kepala Bidang Bina Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

5. Ketua DPRD Kabupaten Banjar di Martapura.

Inspektur Kabupaten Banjar di Martapura

7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjar di Martapura

8. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjar di Martapura

9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar di Martapura

10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

## AKTA PENDIRIAN YAYASAN

## " HAWAR FUTIH "

Homor: 28

## NTY, SH.MKn ATEN BANJAR

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2010 tigareluh satu Agustus tahun duaribu sepuluh! jam 19.00 vimA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah) Terter 1 p kepada saya, WENNY HERLIANTY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Banjar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal din yang nama-namanya akan disebutkan pada akbir akta \_ni:-----1. Nyonya Hajjah FATMAWATI, lahir di Kuin Kec I, 1962 tanggal 11-03-1963 (sebelas Maret tahun sembilanratus enampuluh tiga), Warg inte Indonesia, Ibu rumah tangga, pertempat ting... Kabupaten Banjar, Desa Kuin Kecil, Aukun Tetanga 001, Desa Kuin Kecil, pemegang Kartu Tanda Penduluk Nomor: 63030151036300C7; -----

2. Tuan MURNI, lahir di Amuntai, pala impgal 12-05-1960 (duabelas Mei tahun seribu semilari is enampuluh), Warga Negara Indonesis, Saisa, bertempat tinggal di Kabupaten benjar, sei ing Kecil, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 05, sei Kuin Kecil, pemegang Kaitu Tanda Pench of Kecil, 6303011205600003;----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada
penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
tersebut dan saya, Notaris
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapur
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

KABUPATEN BANJAR

ZAFERMOS MINISTRALIANTY, SH., M. KO

the person sector features

January 1900 sector features

January 1900 sector features

Johnson 1900 sector features



## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0010219.AH.01.04.Tahun 2021 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR PUTIH INDAH BERSERI tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021041363101065 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAWAR PUTIH INDAH BERSERI;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Memberikan pengesahan badan hukum: KESATU

YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI

berkedudukan di KABUPATEN BANJAR sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 13 April 2021 yang dibuat oleh Notaris WENNY HERLIANTY, SH., M.KN berkedudukan di

KABUPATEN BANJAR.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013320.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 April 2021

# Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Kabupaten Banjar

WENNY HERLIANTY, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Banjar



## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0010219.AH.01.04.Tahun 2021

#### **TENTANG**

## PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN MAWAR PUTIH INDAH BERSERI

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT			
HASANUDIN	6303010102670003			
ISNANIAH	6303047004 <mark>870001</mark>			
KURNIAWAN	6303011707850008			
MASRUFAH	6303014610920001			
SAMLAN	6303010108610004			

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN		JABATAN
HASANUDIN	6303010102670003	PEMBINA	KETUA	
SAMLAN	6303010108610004	PENGURUS	KETUA	
ISNANIAH	6303047004870001	PENGURUS	SEKRETARIS	
MASRUFAH	6303014610920001	PENGURUS	BENDAHARA	
KURNIAWAN	6303011707850008	PENGAWAS	KETUA	



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 April 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013320.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 14 April 2021